Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 32532-32537

Implementasi Program Asistensi Anggaran Dinas Sosial Dalam Mengurangi Jumlah Anak Jalanan Di Kota Kupang

Maria Asoi Seran[1], Made N. D. Andayana[2],
Delila A. Nahak Seran[3], Jim Briand Kolianan[4]
[1234]Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Nusa Cendana Kupang
Corresponding Author: Maria Asoi Seran, e-mail: soyseran29@gmail.com, made.andayana70@gmail.com, delila.seran@staf.undana.ac.id, jim.kolianan@staf.undana.ac.id

Published: June , 2026

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah peningkatan jumlah anak jalanan di Kota Kupang yang mencapai 338 anak pada tahun 2025, Dinas Sosial menyalurkan bantuan melalui program asistensi sosial kepada 200 anak jalanan, dengan besaran bantuan sebesar Rp750.000 untuk setiap penerima. Tujuan penelitian adalah menganalisis Implementasi Program Asistensi Anggaran oleh Dinas Sosial dalam mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Kupang. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus; sampel 12 informan purposive (1 Kepala Bidang, 1 LSM, 5 anak jalanan, 5 orang tua). Instrumen meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi; analisis data via reduksi, penyajian, dan verifikasi Miles-Huberman dengan triangulasi. Hasil menunjukkan komunikasi yang dilakukan belum optimal karena frekuensi sosialisasi yang terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. pelaksanaan monitoring belum merata dan kendala kelengkapan administrasi penerima bantuan. Kesimpulan: Program Asistensi Anggaran memiliki dampak positif dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan namun, program ini belum efektif dalam mencapai tujuan utamanya yaitu mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Kupang.

Kata Kunci: Implementasi Program, Asistensi Anggaran, Anak Jalanan, Dinas Sosial, Kota Kupang

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Tingginya jumlah anak jalanan di Kota Kupang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang memaksa anak- anak tersebut harus bekerja untuk mencari nafkah sehingga banyak anak berkeliaran di bawah lampu merah (Setiawan, 2019). Jumlah anak jalanan di Kota Kupang mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 318 anak pada tahun 2025 (Dinas sosial Kota Kupang, 2025).

Program Bantuan Asistensi Anggaran merupakan salah satu upaya Dinas Sosial dalam mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Kupang. Total dana yang dialokasikan pemerintah untuk program ini sebesar Rp150.000.000, yang kemudian disalurkan kepada 200 anak penerima manfaat. Setiap anak menerima bantuan sebesar Rp750.000, yang disalurkan secara non-tunai melalui transfer ke rekening bank masing-masing anak setiap awal tahun (Dinas sosial Kota Kupang, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek pelaksanaan dan penyaluran bantuan progam pemerintah untuk anak jalanan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang menganalisis hubungan antara asistensi anggaran dan jumlah anak jalanan secara menyeluruh khususnya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III,

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Nugroho, 2009). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis realisasi program asistensi anggaran, termasuk ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran, serta dampak program terhadap pengurangan jumlah anak jalanan di Kota Kupang guna mengetahui pelaksanaan program dan penyaluran bantuan kepada anak jalanan.

Meskipun demikian, pelaksanaan Program Asistensi Anggaran di Kota Kupang menghadapi kendala seperti sosialisasi yang tidak menyeluruh, dana yang dialokasikan pemerintah hanya cukup untuk 200 anak, sedangkan jumlah anak jalanan pada tahun 2025 mencapai 338 anak. Keterbatasan anggaran tersebut membuat 138 anak tidak memperoleh bantuan. Ketiadaan SOP pendataan dan pembinaan yang jelas, lemahnya koordinasi antara Dinas Sosial, pihak perbankan, dan Sentra Evata, serta pembagian tugas yang belum optimal menyebabkan pelaksanaan program berjalan lambat dan kurang terarah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Asistensi Anggaran oleh Dinas Sosial dalam mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Kupang. Urgensinya terletak pada peningkatan jumlah anak jalanan yang masih terjadi meskipun program telah dilaksanakan, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap implementasi program. Kebaruannya memberikan kontribusi teoritis pada kajian administrasi negara khususnya implementasi Program Asistensi Anggaran, serta praktis bagi Dinas Sosial dalam merumuskan program untuk mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Kupang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami fenomena pelaksanaan Program Asistensi Anggaran secara holistic melalui deskripsi mendalam terhadap konteks, proses, dan hasilnya di Kota Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menganalisis realisasi program asistensi anggaran, termasuk ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran, serta dampak program terhadap pengurangan jumlah anak jalanan tanpa pengukuran statistik sesuai dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang menekankan analisis komprehensif pada empat dimensi utama. (Sugiyono, 2018; Suryono, 2010; Nugroho, 2009).

Instrumen penelitian mencakup pedoman wawancara semi-struktur, lembar observasi, dan dokumentasi, sementara teknik pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif langsung terhadap kondisi penerima bantuan, serta studi dokumen seperti laporan Dinas Sosial Kota Kupang. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data (seleksi relevan), penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verificasi iteratif hingga valid. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (berbagai informan), teknik (wawancara-observasi-dokumen), dan waktu (pengumpulan berulang), untuk meminimalkan bias dan meningkatkan kredibilitas temuan. (Sugiyono, 2018; Miles et al., 2020).

Populasi penelitian adalah 200 anak jalanan penerima Program Asistensi Anggaran beserta aparatur terkait, dengan sampel ditentukan secara purposive sebanyak 12 informan: 1 Kepala Bidang Rehabilitas, 1 LSM (pendamping anak jalanan), 5 anak jalanan (penerima bantuan), 5 orang tua anak jalanan. Teknik purposive memastikan informan paling kompeten dalam memberikan informasi terkait implementasi Program Asistensi Anggaran. (Sugiyono, 2018).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian. (Sugiyono, 2018).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian yang telah dianalisis. (Sugiyono, 2018).

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap: persiapan (identifikasi lokasidan izin etik), pengumpulan data primer (wawancara dan observasi lapangan pada Januari-April 2026, dokumentasi

data sekunder seperti tabel jumlah anak jalanan di Kota Kupang dan komponen anggaran Program Asistensi Anggaran dari Dinas Sosial, 2025) analisis interaktif (reduksi dan triangulasiparalel), serta interpretasi hasil terkait implementasi Program Asistensi Anggaran dalam mengurangi jumlah anak jalanan. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang secara sistematis untuk menjawab pertanyaan utama tentang implementasi Program Asistensi Anggaran dalam mengurangi jumlah anak jalana di Kota Kupang. (Creswell & Creswell, 2022; Dinas Sosial, 2025; Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Asistensi Anggaran Dinas Sosial Dalam Mengurangi Jumlah Anak Jalanan Di Kota Kupang

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III dari Nugroho (2009) untuk menganalisis Program Asistensi Anggaran dalam mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Kupang. Model ini menganalisis secara sistematis melalui empat komponen: Komunikasi (proses penyampaian program), Sumber Daya (ketersediaan anggaran dan aparat pelaksana), Disposisi (komitmen dan sikap implementor), serta struktur birokrasi (Standar Operasional Prosedur dan tugas implementor).

1. Komunikasi

Komunikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana program ini di komunikasikan pada organisasi publik dan anak jalanan sebagai sasaran program.

A. Sosialisasi Program Kepada Pelaksana dan Peneriman Manfaat

Dinas Sosial Kota Kupang telah melaksanakan sosialisasi Program Asistensi Anggaran melalui berbagai saluran komunikasi, yaitu forum Musrenbang, sosialisasi langsung kepada kelompok sasaran, serta pemanfaatan media sosial seperti Facebook, TikTok, dan Instagram. Penggunaan berbagai media tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Namun, pelaksanaan sosialisasi masih menghadapi beberapa kendala. Frekuensi sosialisasi yang umumnya hanya dilakukan satu kali dalam setahun serta pelaksanaan kegiatan pada jam kerja menyebabkan tidak semua penerima manfaat dapat berpartisipasi secara langsung. Meskipun demikian, masyarakat tetap memperoleh informasi melalui media sosial maupun pendamping sosial yang berperan sebagai perantara informasi.

Dalam komunikasi implementasi kebijakan, temuan ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam bentuk transmisi informasi telah berjalan cukup baik karena informasi program disampaikan melalui berbagai saluran. Akan tetapi, efektivitas sosialisasi belum optimal karena keterbatasan frekuensi pelaksanaan dan belum meratanya jangkauan kepada seluruh penerima manfaat.

B. Kejelasan dan Pemahaman Informasi Program

Tujuan dan sasaran Program Asistensi Anggaran telah dipahami dengan baik oleh pelaksana program. Program ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan serta mencegah mereka kembali bekerja di jalan, dengan sasaran utama anak jalanan dan anak terlantar yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Di sisi lain, penerima manfaat pada umumnya telah mengetahui keberadaan program melalui orang tua, teman sebaya, maupun sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Namun, pemahaman mereka terhadap tujuan, mekanisme, dan peruntukan bantuan masih terbatas. Sebagian penerima manfaat hanya memahami program sebagai bantuan keuangan tanpa mengetahui secara jelas tujuan utama program dalam mengurangi aktivitas anak di jalan. Dalam aspek komunikasi impelementasi kebijakan kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara informasi yang disampaikan oleh pelaksana dengan pemahaman yang diterima oleh penerima manfaat.

2. Sumber Daya

Sumber Daya dalam penelitian ini adalah kemampuan aparat Dinas Sosial Kota Kupang dalam melaksanakan program dan kecukupan biaya operasional serta sarana dan prasarana kerja (fasilitas dan peralatan) dalam melaksankan proses pemberian bantuan.

A. Ketersediaan Anggaran (Sumber Daya Dana)

Anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial untuk Program Asistensi Anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 150.000.000.

Tabel 1 Komponen Anggaran

No	Komponen Anggaran	Bantuan	Jumlah Anak Penerima Bantuan	Kegunaan Anggaran
1	Bantuanper Anak Jalanan	Rp. 750.000/ anak	200 anak	Bantuan non-tunai yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima bantuan
Total		Rp. 150.000.000		

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa total dana yang dialokasikan pemerintah untuk program ini sebesar Rp150.000.000, yang kemudian disalurkan kepada 200 anak penerima manfaat. Setiap anak menerima bantuan sebesar Rp750.000.

Ketersediaan anggaran dalam Program Asistensi Anggaran belum sepenuhnya memadai. Meskipun anggaran yang tersedia telah direalisasikan secara optimal, jumlahnya belum mampu menjangkau seluruh anak jalanan yang menjadi sasaran program. Pengurangan anggaran serta keterbatasan keuangan daerah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan program. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial melalui kerja sama dengan pihak lain dan penyaluran bantuan secara bertahap menunjukkan adanya komitmen dalam menjalankan program.

Dalam aspek sumber daya implementasi kebijakan temuan penelitian menunjukkan keterbatasan anggaran Program Asistensi Anggaran berdampak pada belum meratanya penerima manfaat, sehingga implementasi program dapat dikatakan belum efektif dalam mengurangi jumlah anak jalanan.

B. Ketersediaan Aparat Pelaksana (Sumber Daya Manusia)

Dinas Sosial Kota Kupang memiliki jumlah pendamping sosial berjumlah 21 orang yang secara khusus bertugas dalam melakukan pendataan, sosialisasi, serta pendampingan terhadap anak jalanan selama pelaksanaan program.

Dinas Sosial juga menjalin kerja sama dengan pihak lain, seperti Sentra Evata. Dalam hal ini, Dinas Sosial berperan dalam mengusulkan dan mendata anak jalanan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa atensi, sehingga memperkuat dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program.

Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan sosialisasi serta belum adanya program pelatihan atau pemberdayaan yang berkelanjutan bagi anak jalanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran sumber daya manusia masih terbatas pada fungsi administratif dan penyaluran bantuan, belum mampu mendorong perubahan yang bersifat jangka panjang.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan/komitmen, konsistensi dan kejujuran dari pendamping dinas social untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar,serta tingkat demokrasi dalam pelaksanaannya.

A. Komitmen dan Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Tugas

Komitmen Dinas Sosial dalam menjalankan Program Asistensi Anggaran pada dasarnya sudah ada, namun sangat dipengaruhi oleh kondisi anggaran yang tersedia. Selain komitmen, Dinas Sosial juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anak jalanan yang telah menerima bantuan.

Pelaksanaan monitoring belum dilakukan secara merata atau belum mampu menjangkau seluruh penerima bantuan secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek konsistensi dan tanggung jawab pelaksana masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, disposisi pelaksana dalam program ini dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pencapaian tujuan program secara menyeluruh.

B. Sikap Pelaksana Terhadap Tujuan dan Manfaat Program

Dalam pelaksanaannya, anak jalanan cenderung mudah menerima bantuan yang diberikan dan merespon dengan cepat. Keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan Program Asistensi Anggara, karena orang tua memiliki peran utama dalam mengarahkan anak.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk intervensi dan pendampingan, penanganan anak jalanan belum sepenuhnya efektif, banyak anak yang masih kembali ke jalan setelah mendapatkan bantuan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor mental, kebiasaan, serta motivasi anak untuk memperoleh penghasilan tambahan atau belas kasihan dari masyarakat.

Dalam aspek disposisi kebijakan publik sikap pelaksana terhadap tujuan dan manfaat Program Asistensi Anggaran sudah menunjukkan disposisi yang cukup baik, terlihat dari adanya pendekatan yang humanis melalui proses pendampingan, asesmen, serta upaya melibatkan keluarga dalam penanganan anak jalanan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam penelitian ini yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab pendamping Dinas Sosial serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai kerangka kerja dalam melaksanakan Program Asistensi Anggaran.

A. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Agen Pelaksana

Dinas Sosial memiliki peran aktif dalam proses pendataan calon penerima bantuan. Pendataan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi anak jalanan secara nyata.

Namun demikian, pembagian tugas belum berjalan secara optimal karena masih terpusat pada satu bidang, yaitu bidang rehabilitasi, tanpa adanya pembagian tim yang spesifik.

B. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dinas Sosial Kota Kupang dala pelaksanaan Program Asistensi Anggaran belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) secara formal. Nmun dalam praktiknya telah terdapat tahapan-tahapan kerja yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, khususnya dalam proses asesmen, perencanaan, pelaksanaan intervensi, hingga monitoring dan evaluasi, yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program.

Ketiadaan SOP formal berpotensi menyebabkan pelaksanaan program kurang terstandarisasi dan berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan di lapangan, sehingga perlu adanya penyusunan SOP yang lebih jelas agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Hambatan dalam Implementasi Program Asistensi Anggaran

Dalam pelaksanaan Program Asistensi Anggaran, terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi program sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran Program

Keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak pada terbatasnya jumlah penerima bantuan, tetapi juga mempengaruhi kualitas, keberlanjutan, serta efektivitas implementasi program secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan sumber daya finansial yang

memadai dan berkelanjutan, program asistensi anggaran tidak akan mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Kupang secara signifikan.

2. **Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat**

   Komunikasi yang dilakukan masih bersifat tidak langsung, kurang intensif, dan belum mempertimbangkan kondisi sosial target penerima. Kurangnya sosialisasi tidak hanya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program.

3. **Keterbatasan Tenaga Pendamping Sosial**

   Sulitnya menjangkau orang tua anak jalanan, disebabkan karena sebagian besar orang tua memiliki pekerjaan yang tidak menentu dan waktu yang terbatas untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Dalam konteks ini, meskipun jumlah pendamping secara kuantitatif terlihat cukup, namun secara fungsional belum mampu menjangkau seluruh sasaran secara optimal. Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan, kurang maksimalnya pembinaan, serta rendahnya efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. **Faktor Perilaku dan Kebiasaan Anak Jalanan**

   Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pelaksana, tetapi juga oleh sikap, motivasi, dan kondisi pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam hal ini, meskipun pelaksana telah menjalankan program dengan memberikan bantuan, namun perubahan perilaku anak jalanan tidak terjadi karena tidak adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

   Hal ini menunjukkan bahwa program yang hanya berfokus pada pemberian bantuan finansial tidak cukup untuk mengatasi permasalahan anak jalanan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, seperti pembinaan berkelanjutan, pendidikan, serta penguatan peran keluarga, agar perubahan perilaku dapat terjadi secara permanen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Asistensi Anggaran memiliki dampak positif dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan, terutama dalam bidang pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, program ini belum efektif dalam mencapai tujuan utamanya yaitu mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Kupang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, rendahnya frekuensi bantuan, kondisi ekonomi keluarga, serta kebiasaan anak yang sudah terbiasa bekerja di jalan.

REFERENSI

Agus Suryono. 2010. Pengantar Teori Pembangunan. Malang: Universitas Negeri Malang.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches(6th ed.). Sage Publications.

Dinas Sosial Kota Kupang. (2025). Data Jumlah Anak Jalanan Di Kota Kupang Tahun 2021-2025. Dinas Sosial Kota Kupang.

Dinas Sosial Kota Kupang. (2025). Dokumen Komponen Anggaran Program Asistensi Anggaran 2025. Dinas Sosial Kota Kupang.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook(4th ed.). Sage Publications.

Nugroho Riant. 2009. Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajeman Kebijakan. Jakarta : Gramedia

Setiawan, H. (2019). Mencegah Menjadi Anak Jalanan dan Mengembalikannya Kepada Keluarga Melalui Model *Comunnity Based*.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta.